

## Dukungan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Penangkaran Benih Kelapa di Kabupaten Gorontalo

Wawan Moh. R. Dien<sup>1</sup>, Merita Ayu Indrianti<sup>2</sup>, Moh Muchlis Djibran<sup>3</sup> Dewa Oka Suparwata<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Gorontalo  
mmjibran17@umgo.ac.id

### ABSTRACT

*The development of coconut seed breeding businesses in Gorontalo Regency plays an important role in supporting the agricultural sector, particularly in providing quality seeds to increase coconut productivity. This study aims to analyze government policy support for the development of coconut seed breeding businesses in the region and identify challenges in its implementation. The research method used is qualitative with a descriptive-explanatory approach, combining descriptive data and analysis of relationships between variables. Data were collected through in-depth interviews with coconut seedling nursery entrepreneurs and government officials, as well as documentation studies related to existing policies and regulations. The results of the study indicate that the Gorontalo Regency government has provided significant support through clear regulations and strategic programs. However, the implementation of these policies is constrained by budget limitations, low interest among young people in seedling cultivation, and a lack of understanding about the importance of high-quality seeds among farmers. This study recommends increasing budget allocations, improving training systems, and providing more attractive incentives to encourage young farmers to participate in coconut seedling cultivation.*

**Keywords:** Government Policy, Coconut Seed Breeding, Gorontalo, Challenges, Agricultural Policy, High-Quality Seeds

### ABSTRAK

Pengembangan usaha penangkaran benih kelapa di Kabupaten Gorontalo memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam penyediaan benih berkualitas untuk meningkatkan produktivitas kelapa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan usaha penangkaran benih kelapa di daerah tersebut serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksplanatori, yang menggabungkan data deskriptif dan analisis hubungan antar variabel. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengusaha penangkar benih kelapa dan pejabat pemerintah, serta studi dokumentasi terkait kebijakan dan regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Gorontalo telah memberikan dukungan signifikan melalui regulasi yang jelas dan program-program strategis. Namun, implementasi kebijakan ini terkendala oleh keterbatasan anggaran, rendahnya minat generasi muda dalam usaha penangkaran, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya benih unggul di kalangan petani. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan alokasi anggaran, perbaikan dalam sistem pelatihan, serta insentif yang lebih menarik untuk mendorong partisipasi petani muda dalam usaha penangkaran benih kelapa.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemerintah, Penangkaran Benih Kelapa, Gorontalo, Tantangan, Kebijakan Pertanian, Benih Unggul

## I. Pendahuluan

Kabupaten Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan tanaman kelapa, yang berperan sebagai sumber pendapatan utama bagi masyarakat setempat. Kelapa tidak hanya menjadi komoditas ekonomi yang penting, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi lokal dan regional. Komoditas ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan menjadi elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi di Gorontalo (Ilato et al., 2022). Oleh karena itu, pengembangan sektor kelapa, khususnya dalam bentuk diversifikasi produk, sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi wilayah ini.

Diversifikasi produk kelapa, seperti produksi minyak kelapa murni (VCO) dan cocopeat, telah menunjukkan dampak positif di beberapa daerah, termasuk di Desa Bihe yang melaksanakan pelatihan untuk memberdayakan masyarakat. Hasilnya adalah peningkatan pendapatan petani dan pembukaan peluang usaha baru (Kandowanko et al., 2024). Selain itu, di Kabupaten Tabongo, pengolahan kelapa menjadi kopra dan minyak telah berhasil meningkatkan margin keuntungan yang signifikan, menunjukkan bahwa pengembangan industri pengolahan kelapa dapat memperkuat kinerja perkebunan kecil melalui integrasi rantai pasokan (Wahyudi et al., 2022).

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan usaha penangkaran benih kelapa di Kabupaten Gorontalo masih terkendala oleh tantangan penyediaan benih berkualitas. Untuk mendukung produktivitas pertanian, kualitas benih harus dijaga melalui seleksi genetik yang baik, budidaya yang tepat, dan teknik pengolahan inovatif. Kebun benih terisolasi dan penyerbukan terkontrol dapat meningkatkan kualitas genetik benih kelapa, yang berdampak pada hasil dan ketahanan tanaman. Metode seperti HPLC dan NIRS kini digunakan untuk menilai kualitas benih kelapa secara efektif (Wilms et al., 2019). Pemerintah berperan penting dalam mendukung pengembangan ini melalui kebijakan seperti subsidi, pelatihan, dan pengawasan kualitas. Program serupa di Sulawesi Utara dan Sri Lanka menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat meningkatkan produksi kelapa dan kesejahteraan petani, meskipun ada perdebatan tentang efektivitasnya (Yusuf et al., 2021).

Namun, meskipun ada kebijakan yang mendukung, pengusaha penangkar benih kelapa di Kabupaten Gorontalo masih menghadapi kendala dalam hal akses terhadap teknologi, modal, dan distribusi benih yang belum merata. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana kebijakan pemerintah mempengaruhi pengembangan usaha penangkaran benih kelapa di Gorontalo dan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pengusaha dalam menerapkan kebijakan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha penangkaran benih kelapa di Kabupaten Gorontalo serta menganalisis kendala yang dihadapi oleh pengusaha penangkar benih kelapa dalam menerapkan kebijakan pemerintah di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat penting untuk mendukung pengembangan usaha penangkaran benih kelapa yang berkualitas di Kabupaten Gorontalo. Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk kelapa, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor, penguatan sektor penangkaran benih kelapa akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Selain itu, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki implementasi kebijakan pemerintah yang ada, serta mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha penangkar benih kelapa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Gorontalo, khususnya dalam sektor pertanian kelapa.

## II. Kajian Literatur Terdahulu (Literature Review)

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan perhatian terhadap kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian, khususnya pengembangan usaha penangkaran benih kelapa. Kelapa merupakan komoditas yang sangat penting bagi ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan yang fokus pada pengembangan sektor kelapa berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian melalui beberapa cara, termasuk subsidi benih dan pelatihan untuk petani. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung distribusi benih berkualitas dan memberikan pelatihan bagi petani dapat meningkatkan hasil produksi kelapa (Ilato et al., 2022; Wahyudi et al., 2022). Meskipun demikian, tidak ditemukan studi yang relevan yang secara langsung membahas dampak kebijakan benih kelapa terhadap produktivitas, sehingga masih ada gap dalam penelitian mengenai hal ini.

Dalam hal pelatihan petani, penelitian oleh Wijayani et al. (2022) menunjukkan keberhasilan program yang mengajarkan diversifikasi produk kelapa, seperti produksi minyak kelapa murni (VCO) dan penggunaan cocopeat, yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan teknologi dan praktik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan hasil produksi, yang juga sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa diversifikasi produk kelapa memiliki dampak positif terhadap ekonomi lokal (Kandowanko et al., 2024). Lebih lanjut, Djibran et al. (2023) menegaskan bahwa model pertanian berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi terbukti mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat, kesejahteraan petani, serta pendapatan usaha pertanian secara signifikan, sehingga relevan sebagai rujukan dalam upaya pengembangan kapasitas petani penangkar benih kelapa di Kabupaten Gorontalo.

Tantangan dalam implementasi kebijakan pengembangan sektor kelapa masih signifikan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah distribusi benih berkualitas yang tidak merata. Banyak petani masih bergantung pada benih lokal yang kurang berkualitas, yang berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Sugiarto & Raisawati (2021) Sugiarto dan Raisawati (2021) mengungkapkan bahwa hambatan terbesar dalam usaha penangkaran benih adalah prosedur sertifikasi yang rumit dan biaya tinggi, yang menghalangi petani untuk mengembangkan usaha penangkaran benih secara lebih luas. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih spesifik mengenai kebijakan yang dapat meningkatkan distribusi dan akses terhadap benih unggul di daerah-daerah tertentu seperti Kabupaten Gorontalo.

Secara keseluruhan, meskipun sejumlah kebijakan telah diimplementasikan untuk mendukung pengembangan sektor kelapa, tantangan dalam penerapannya masih besar. Penelitian lanjutan yang fokus pada efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kualitas benih dan pengembangan kapasitas petani di sektor pertanian kelapa di Indonesia sangat diperlukan. Keterlibatan aktif dari pemerintah dalam menyediakan insentif dan dukungan bagi petani untuk mengadopsi benih unggul dan teknologi perbenihan yang lebih baik sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam pengembangan sektor ini.

## III. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, dengan pemilihan beberapa lokasi yang representatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan kebijakan pemerintah dalam sektor penangkaran benih kelapa. Waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yaitu dari November hingga Desember 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-eksplanatori, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi serta

menjelaskan hubungan antar variabel, khususnya pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengembangan usaha penangkaran benih kelapa.

Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder. Data primer meliputi: (1) persepsi dan pengalaman pengusaha penangkar benih kelapa terhadap implementasi kebijakan pemerintah; (2) pandangan pejabat pemerintah terkait program dukungan yang telah dan sedang dilaksanakan; serta (3) kondisi lapangan mengenai kendala dan peluang dalam usaha penangkaran benih kelapa. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengusaha penangkar benih kelapa dan pejabat pemerintah, serta observasi langsung di lapangan. Adapun data sekunder mencakup: (1) dokumen regulasi dan peraturan daerah (Perda) terkait pengembangan benih kelapa; (2) laporan program pemerintah di sektor perbenihan; dan (3) data statistik pertanian yang relevan dengan sektor pertanian kelapa di Kabupaten Gorontalo.

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik informan dan respons mereka terhadap kebijakan yang diterapkan. Data yang dianalisis mencakup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan persepsi terhadap kebijakan pemerintah. Pengusaha penangkar benih kelapa dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam kebijakan menjadi informan kunci. Data sekunder yang diperoleh dari laporan kebijakan dan statistik resmi juga digunakan untuk memperkaya analisis. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap pengembangan usaha penangkaran benih kelapa, serta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Kabupaten Gorontalo.

#### **IV. Hasil Dan Pembahasan**

##### **Program Dukungan dalam Mendukung Pengembangan Usaha Penangkaran Benih Kelapa di Kabupaten Gorontalo**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, yakni Bapak Amon S. Lasimpeng, S.P, M.P yang menjabat sebagai Kasie Perbenihan Tanaman Tahunan Bidang Perkebunan, diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kebijakan khusus yang berkaitan dengan pengembangan benih kelapa di Kabupaten Gorontalo. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan dasar hukum dalam pengembangan sektor benih kelapa, khususnya dalam mendukung usaha penangkaran. Secara eksplisit, regulasi yang menjadi landasan hukum pengembangan sektor benih kelapa di Kabupaten Gorontalo antara lain mencakup peraturan tentang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, yang mengatur standar kualitas benih, prosedur sertifikasi, dan mekanisme pengawasan oleh Dinas Pertanian. Selain regulasi, pemerintah juga telah menyusun program-program strategis seperti Program Pengembangan Kebun Benih Kelapa Unggul, kegiatan pembinaan dan pendampingan teknis bagi penangkar benih, serta program distribusi benih kelapa bersertifikat kepada petani mitra.,

Tingkat prioritas pemerintah daerah terhadap pengembangan benih kelapa dinilai tinggi oleh informan, yang menunjukkan bahwa sektor ini dipandang penting dalam pembangunan pertanian di Gorontalo. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan komoditas kelapa melalui penyediaan benih yang unggul dan berkualitas. Kebijakan yang telah ditetapkan dinilai cukup efektif dalam mendorong perkembangan usaha penangkaran benih kelapa. Adapun bentuk dukungan teknis yang diberikan pemerintah daerah kepada penangkar benih kelapa antara lain meliputi: (1) pendampingan teknis dalam proses seleksi pohon induk dan pemanenan benih; (2) pelatihan teknik budidaya dan pengelolaan kebun sumber benih; (3) fasilitasi akses laboratorium pengujian mutu benih; serta (4) dukungan administratif dalam pengurusan sertifikasi benih melalui Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program secara optimal, seperti pembinaan, pengawasan mutu benih, serta peningkatan kapasitas petani penangkar melalui pelatihan dan penyuluhan.

Dari wawancara juga terungkap bahwa kerja sama antar instansi, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sudah mulai terjalin. Meski demikian, kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga penelitian masih perlu ditingkatkan. Secara konkret, bentuk kerja sama yang dibutuhkan dari pihak swasta antara lain mencakup: (1) investasi dalam pembangunan fasilitas penyimpanan benih; (2) kemitraan dalam distribusi dan pemasaran benih bersertifikat; serta (3) penyediaan teknologi pengolahan benih yang lebih modern. Sementara itu, dari lembaga penelitian diharapkan adanya kontribusi dalam: (1) pengembangan varietas unggul kelapa lokal Gorontalo; (2) pelatihan berbasis teknologi terbaru untuk para penangkar; dan (3) penelitian terapan yang mendukung efisiensi produksi benih kelapa. Dalam rangka meningkatkan efektivitas program dukungan ini, peningkatan alokasi anggaran dan perluasan jaringan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan lembaga riset akan sangat diperlukan untuk menjawab tantangan yang ada di lapangan.

### **Kendala yang Dihadapi Oleh Pengusaha Penangkar Benih Kelapa dalam Menerapkan Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Gorontalo**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Hulopi, seorang pengusaha penangkar benih kelapa di Kabupaten Gorontalo, ditemukan bahwa salah satu kendala utama dalam mengembangkan usaha penangkaran benih kelapa adalah keterbatasan anggaran, baik dari sisi internal usaha maupun dari dukungan eksternal pemerintah. Meskipun sudah ada perhatian dari pemerintah daerah, dukungan dana yang tersedia masih belum mencukupi untuk memperluas produksi dan meningkatkan kualitas infrastruktur pembenihan. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan untuk memenuhi permintaan benih dari berbagai daerah, termasuk dari dinas pertanian kabupaten sekitar dan balai penelitian. Sebagai langkah mengatasi kendala anggaran ini, diperlukan upaya peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk sektor perbenihan, pengembangan skema pembiayaan yang ramah bagi penangkar skala kecil, serta mendorong investasi swasta melalui mekanisme kemitraan publik-swasta. Dustmurodov et al. (2020) menekankan pentingnya mekanisme kemitraan publik-swasta dalam sektor pertanian, di mana interaksi yang lebih baik antara sektor-sektor ini dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi pertanian.

Selain keterbatasan anggaran, kendala lain yang signifikan adalah rendahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam usaha penangkaran benih kelapa. Bapak Hulopi menyatakan bahwa banyak petani muda kurang tertarik karena produksi benih kelapa memerlukan waktu lama, mulai dari pembenihan hingga panen yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini sejalan dengan temuan Puryantoro et al. (2023) yang menunjukkan bahwa generasi muda cenderung lebih tertarik pada usaha pertanian yang memberikan hasil dalam jangka waktu singkat. Rendahnya minat generasi muda juga dipengaruhi oleh ketidaktahuan terhadap potensi jangka panjang dan kurangnya akses terhadap informasi yang memadai (Sakti et al., 2024). Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah perlu merancang program yang menunjukkan potensi ekonomi jangka panjang dari usaha penangkaran benih kelapa, termasuk melalui demonstrasi plot dan studi kasus sukses dari penangkar yang telah berhasil. Kurniasih et al. (2023) menekankan pentingnya faktor pendidikan dalam meningkatkan keterampilan dan minat petani muda; oleh karena itu, diperlukan program pelatihan yang tidak hanya mengajarkan aspek teknis, tetapi juga mencakup pendidikan bisnis dan pengelolaan usaha pertanian yang berkelanjutan, serta penyediaan insentif yang memudahkan mereka memulai usaha.

Kendala lainnya adalah tingginya biaya modal dan kompleksitas prosedur sertifikasi benih. Banyak petani menganggap bahwa usaha penangkaran benih kelapa memerlukan modal yang cukup besar, terutama untuk membangun kebun sumber benih dan menjalani proses sertifikasi yang rumit. Sugiarto & Raisawati (2021) memperkuat temuan ini dengan mengungkapkan bahwa hambatan terbesar dalam usaha penangkaran benih kelapa adalah prosedur yang rumit dan biaya tinggi yang terkait dengan sertifikasi dan perizinan. Mereka juga mencatat adanya penurunan penggunaan benih bersertifikat yang dapat dikaitkan dengan tingginya biaya dan prosedur sertifikasi yang tidak efisien. Oleh karena itu,

kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menyederhanakan proses sertifikasi, memberikan fasilitas yang memadai, serta menyediakan pelatihan untuk membantu petani mengatasi hambatan administratif ini.

Tantangan lainnya adalah rendahnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan sektor penangkaran benih kelapa. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya menjalin kerja sama dengan sektor swasta, masih banyak pihak yang belum terlibat secara maksimal, termasuk lembaga penelitian dan akademisi. Penelitian oleh Tando et al. (2020) menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam konteks pengembangan sektor pertanian. Hal ini diperkuat oleh Djibran et al. (2023) yang menemukan bahwa model pertanian berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah, petani, dan berbagai pemangku kepentingan terbukti menghasilkan peningkatan pendapatan rata-rata 28% dan penurunan biaya produksi 15%, sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat tani. Untuk mempercepat perkembangan usaha penangkaran benih kelapa di Kabupaten Gorontalo, diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta untuk memperkuat pengembangan benih kelapa yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pelatihan dan penyuluhan teknis yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam menjalankan usaha penangkaran benih kelapa. Tanpa adanya pemahaman yang memadai mengenai pentingnya benih unggul dan proses penangkaran yang baik, petani cenderung mengabaikan potensi keuntungan jangka panjang dari usaha ini. Hal ini sejalan dengan temuan Sudarwati & Nasution (2024), yang menekankan bahwa keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada peningkatan kapasitas petani dan dukungan teknis yang memadai. Hadanu et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pelatihan teknis tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Penyuluhan yang berkelanjutan akan memastikan bahwa petani memiliki pengetahuan terbaru mengenai teknologi dan praktik terbaik dalam penangkaran benih kelapa, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat langsung diterapkan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas benih yang dihasilkan.

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor penangkaran benih kelapa mempengaruhi berbagai aspek dalam usaha ini, mulai dari kualitas benih yang dihasilkan hingga kapasitas petani untuk mengakses teknologi terbaru. Meskipun ada regulasi yang mendukung, pengalokasian anggaran yang terbatas seringkali menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perbenihan yang berkelanjutan dan efektif, serta untuk mendukung inovasi dan pengembangan kapasitas usaha penangkaran benih kelapa di masa depan. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali alokasi dana untuk program-program yang mendukung pengembangan usaha penangkaran benih kelapa, dengan memberikan prioritas lebih besar pada riset dan pengembangan teknologi. Sinergi antara sektor publik dan swasta dalam pengalokasian anggaran dan pembiayaan akan sangat mempercepat perkembangan usaha ini, sebagaimana ditegaskan oleh Pratiwi & Moeis (2022) bahwa pengelolaan sumber daya yang baik dan kebijakan yang mendukung dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi petani untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih produktif

## **V. Kesimpulan (Conclusions)**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah di Kabupaten Gorontalo telah memberikan dukungan signifikan terhadap pengembangan usaha penangkaran benih kelapa. Kebijakan ini terlihat dalam bentuk kerja sama lintas sektor, seperti kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, serta penyusunan regulasi daerah yang mendukung keberlanjutan sektor benih kelapa. Kerja sama dengan pihak swasta telah memberikan kontribusi terhadap penyediaan teknologi dan kepastian pasar bagi para penangkar benih kelapa, sementara

regulasi daerah memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengembangan usaha ini. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam hal keterbatasan anggaran dan kurangnya pelatihan teknis bagi petani. Hal ini menghambat pengoptimalan program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas benih kelapa yang tersedia.

Kendala utama yang dihadapi oleh pengusaha penangkar benih kelapa dalam menerapkan kebijakan pemerintah meliputi: (1) keterbatasan anggaran yang menghambat ekspansi usaha penangkaran dan pengadaan sarana produksi yang memadai; (2) rendahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam usaha penangkaran akibat lamanya siklus produksi benih dan tingginya biaya investasi awal; (3) kompleksitas prosedur sertifikasi benih yang menjadi penghalang bagi petani skala kecil; serta (4) lemahnya koordinasi antara pemerintah, lembaga penelitian, dan sektor swasta dalam mendukung ekosistem penangkaran benih kelapa secara terpadu.

Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, maka ketersediaan benih kelapa berkualitas di Kabupaten Gorontalo akan terus mengalami defisit, produktivitas kebun kelapa rakyat tidak akan meningkat secara optimal, dan regenerasi petani penangkar benih akan terhambat. Hal ini pada akhirnya dapat melemahkan daya saing sektor kelapa Gorontalo dalam jangka panjang. Oleh karena itu, beberapa saran kebijakan yang perlu diberikan kepada pemerintah setempat antara lain: (1) meningkatkan alokasi anggaran untuk program perbenihan kelapa, khususnya untuk kegiatan pembinaan, pengawasan mutu, dan pelatihan penangkar; (2) menyederhanakan prosedur sertifikasi benih agar lebih mudah diakses oleh penangkar skala kecil; (3) merancang program khusus regenerasi petani penangkar yang mencakup insentif finansial dan pelatihan terpadu bagi generasi muda; serta (4) mendorong terbentuknya skema kemitraan yang terstruktur antara pemerintah, lembaga penelitian, dan sektor swasta dalam pengembangan benih kelapa unggul.

### Daftar Pustaka (*References*)

- Dustmurodov, G. G., Yunusov, I., Ahmedov, U., Murodov, S. M., & Iskandarov, S. T. (2020). The Mechanism for the Development of Public-Private Partnerships in Agriculture (On the Example of the Republic of Uzbekistan). *E3s Web of Conferences*, 224, 04042. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202022404042>
- Hadanu, R., Halim, H., Muzuni, M., Basrudin, B., Amin, M., & Nursalam, N. (2024). Pelatihan Pembuatan Fungi Mikoriza Arbuskula Sebagai Solusi Budidaya Hortikultura: Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 19 Nopember, Kolaka. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(4), 1973–1982. <https://doi.org/10.53769/jai.v4i4.1083>
- Ilato, R., Canon, S., Mahmud, H., & Sulila, I. (2022). Superior Commodities of Gorontalo Province: Finding Way for Development Policies. *Central European Management Journal*, 380–388. <https://doi.org/10.57030/23364890.cemj.30.4.32>
- Kandowanko, N. Y., Ahmad, M., Ibrahim, M., & Febriyanti. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Bihe, Kabupaten Gorontalo melalui Diversifikasi Kelapa Menjadi Virgin Coconut Oil dan Cocopeat. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(2), 175–182. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.10.2.175-182>
- Kurniasih, D., Syaikat, Y., Nurmalina, R., & Suharno, S. (2023). Persepsi Petani Terhadap Tingkat Kekritisian Risiko Usahatani Bawang Putih Dan Strategi Manajemen Risikonya (Studi Kasus Di

- Kabupaten Temanggung). *Jurnal Penyuluhan*, 19(02), 95–112.  
<https://doi.org/10.25015/19202346082>
- Pratiwi, A., & Moeis, J. P. (2022). Sustainable Farming: Respons Petani Tanaman Pangan Terhadap Kepemilikan Lahan Pertanian. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 43–71.  
<https://doi.org/10.21002/jepi.2022.04>
- Puryantoro, P., Widjayanti, L., & Rokhani, R. (2023). Pemuda Dalam Pembangunan Pertanian : A Review. *Agrimor*, 8(4), 197–203. <https://doi.org/10.32938/ag.v8i4.2157>
- Sakti, E. M. S., Marhalinda, M., & Supradaka, S. (2024). Pengembangan Agrowisata Kisuci Menjadi Agrowisata Unggul Dengan Penerapan Teknologi Ekologi, Atraksi Eduwisata, Konten Promosi Media Sosial. *Jurnal Abdi Insani*, 11(4), 1584–1594.  
<https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.1926>
- Sudarwati, L., & Nasution, N. F. (2024). Upaya Pemerintah Dan Teknologi Pertanian Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Petani Di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (Jkarp)*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.32734/jkarp.v3i1.15847>
- Sugiarto, E., & Raisawati, T. (2021). Kajian Peranan Sertifikasi Benih Pada Usaha Penangkaran Benih Dalam Mendukung Pembangunan Di Bengkulu. *Pucuk Jurnal Ilmu Tanaman*, 1(2), 99–106. <https://doi.org/10.58222/pucuk.v1i2.18>
- Tando, C. E., Sudarmo, S., & Haryanti, R. H. (2020). *Collaborative Governance in Overcoming Poverty Problems in Surakarta: A Literature Review*. <https://doi.org/10.2991/icstcsd-19.2020.11>
- Wahyudi, A., Maskromo, I., & Wulandari, S. (2022). Strategi Peningkatan Kinerja Perkebunan Kelapa Rakyat Melalui Integrasi Vertikal Rantai Pasok Dengan Industri Pengolahan Di Gorontalo. *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*, 28(1), 62. <https://doi.org/10.21082/jlitri.v28n1.2022.62-76>
- Wijayani, S., Wirianata, H., & Setyawan, H. (2022). Implementasi Kultur Teknis Di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim. *Agro Bali Agricultural Journal*, 5(3), 584–591. <https://doi.org/10.37637/ab.v5i3.974>
- Wilms, H., Rhee, J. H., Rivera, R. L., Longin, K., & Panis, B. (2019). Developing coconut cryopreservation protocols and establishing cryo-genebank at RDA; a collaborative project between RDA and Bioversity International. *Acta Horticulturae*, (1234), 343–348.  
<https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1234.45>
- Yusuf, Y., Kindangen, J. G., & Yusron, M. (2021). Revitalization of Economic Development of Coconut Area in North Sulawesi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 40(1), 44.  
<https://doi.org/10.21082/jp3.v40n1.2021.p44-57>